

PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA MODAL TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH

Yanuar Zerina Nur Istiqomah

Universitas Negeri Semarang

yanuarrena@students.unnes.ac.id

Grace Natalia Marpaung

Universitas Negeri Semarang

gracenatalia@mail.unnes.ac.id

Abstrak Penelitian ini menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada 114 kabupaten/kota di Pulau Jawa selama periode 2021-2025. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan regresi data panel. Data awal berjumlah 570 observasi. Estimasi akhir menggunakan 456 observasi karena variabel DAU dan belanja modal digunakan dalam bentuk perubahan tahunan. Pemilihan model dilakukan melalui uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Fixed Effect Model merupakan model yang paling tepat. Hasil regresi menunjukkan bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Dana alokasi khusus dan perubahan dana alokasi umum berpengaruh negatif dan signifikan. Perubahan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan. Nilai R-squared sebesar 0,952396 menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 95,24 persen variasi kemandirian keuangan daerah. Temuan ini menegaskan bahwa transfer fiskal tidak selalu memperkuat kemandirian daerah. Efektivitas penggunaan dana dan kemampuan daerah mengoptimalkan pendapatan asli daerah tetap menjadi faktor utama dalam memperkuat kemandirian daerah.

Kata Kunci *Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Kemandirian Daerah*

PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal di Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, bertujuan untuk mendorong kemandirian daerah dalam pengelolaan keuangan mereka. Kemandirian keuangan daerah adalah kondisi di mana suatu daerah mampu membiayai kegiatan pemerintahan dan pelayanan publiknya tanpa ketergantungan yang besar pada anggaran dari pemerintah pusat (Bella dkk., 2022). Dalam rangka mewujudkan desentralisasi fiskal, pemerintah pusat memberikan dana perimbangan kepada daerah-daerah di Indonesia, dana perimbangan atau transfer ke daerah terdiri atas Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil. Ketiga instrumen fiskal tersebut diarahkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah serta mendukung pendanaan urusan pemerintahan daerah. Melalui alokasi dana transfer, pemerintah daerah diharapkan memiliki kapasitas fiskal yang lebih memadai untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik, akan tetapi peningkatan kemandirian fiskal tetap bergantung pada kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah, bukan hanya pada besarnya dana transfer yang diterima (Nurrahmadani, 2024).

Namun, meskipun desentralisasi fiskal diarahkan untuk memperkuat kemandirian daerah, realitas empiris menunjukkan bahwa sebagian pemerintah daerah masih menghadapi ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Ketergantungan tersebut tampak dari dominannya komponen dana perimbangan, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), dalam struktur pendapatan daerah. DAU pada dasarnya berfungsi untuk menutup celah fiskal daerah, tetapi dalam praktiknya sering digunakan untuk membiayai kebutuhan belanja rutin, termasuk belanja pegawai. Kondisi ini dapat membatasi ruang fiskal daerah untuk mengalokasikan anggaran pada belanja produktif, sehingga pencapaian kemandirian fiskal daerah belum sepenuhnya optimal (Rifda Fadhiilah, 2024). Temuan serupa juga dijelaskan oleh (Nugroho, 2025) bahwa dominasi dana transfer dalam struktur pendapatan daerah mencerminkan rendahnya kemandirian fiskal daerah dalam membiayai aktivitas pemerintahan dan pembangunan. Dengan demikian, dana perimbangan perlu dipahami bukan hanya sebagai sumber pembiayaan daerah, tetapi juga sebagai indikator ketergantungan fiskal apabila kontribusi PAD belum mampu menjadi sumber utama pendapatan daerah.

Sebaliknya, Dana Alokasi Khusus (DAK), yang lebih terarah pada proyek-proyek tertentu, seperti pembangunan infrastruktur, memiliki potensi yang lebih besar untuk mendorong perekonomian daerah dan mempercepat kemandirian fiskal. Penelitian (Imel Oktaviani Pramesti, 2025) menjelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) digunakan untuk membiayai kegiatan khusus daerah, terutama pembangunan dan peningkatan sarana-prasarana fisik yang menjadi prioritas pemerintah. Dengan fokus pada belanja fisik infrastruktur, DAK berpotensi menjadi modal dasar bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi daerah, meskipun penggunaannya tetap dibatasi oleh prioritas dan ketentuan dari pemerintah pusat.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan salah satu komponen dana transfer yang memiliki karakteristik berbeda dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DBH dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari penerimaan pajak dan sumber daya alam yang berasal dari daerah, sehingga secara konseptual lebih berkaitan dengan potensi fiskal daerah asal. Namun, keterkaitan tersebut tidak selalu berimplikasi langsung terhadap peningkatan kemandirian keuangan daerah. (Saptono & Mahmud, 2023) menemukan bahwa DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah kabupaten/kota di Indonesia, berbeda dengan DAU yang berpengaruh positif. Temuan ini menunjukkan bahwa DBH dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah hanya apabila diikuti oleh optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan tata kelola fiskal yang efektif. Oleh karena itu, pengaruh DBH terhadap kemandirian keuangan daerah perlu diuji secara empiris, khususnya pada kabupaten/kota di Pulau Jawa yang memiliki variasi basis pajak, struktur ekonomi, dan kapasitas fiskal daerah.

Selain dana perimbangan, belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah juga berperan penting dalam meningkatkan kemandirian daerah. Belanja modal yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur fisik dapat menciptakan efek multiplier yang meningkatkan aktivitas ekonomi lokal dan, pada akhirnya, dapat meningkatkan PAD. Penelitian oleh (Riris Nurjanah, 2024) menjelaskan bahwa belanja modal yang diarahkan pada infrastruktur publik, seperti jalan, jembatan, pasar, dan fasilitas pelayanan masyarakat, dapat mendorong aktivitas ekonomi lokal. Peningkatan aktivitas ekonomi tersebut berpotensi memperluas basis pajak dan retribusi daerah, sehingga dalam jangka menengah dapat memperkuat kemandirian keuangan daerah.

Namun, belanja modal yang tidak terencana dengan baik atau tidak tepat sasaran dapat mengakibatkan pemborosan anggaran tanpa memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pengaruh belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah sangat ditentukan oleh efektivitas pengelolaan dan arah penggunaannya. (Fitriyani, 2021) menemukan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa belanja modal dapat mendukung kemandirian daerah apabila diarahkan pada pembangunan yang produktif dan mampu memperkuat kapasitas ekonomi daerah. Sejalan dengan itu, penelitian (Febrian et al., 2026) menegaskan bahwa belanja modal yang tidak dioptimalkan untuk kegiatan produktif cenderung memiliki hubungan lemah bahkan negatif dengan kemandirian keuangan

daerah. Dengan demikian, belanja modal tidak cukup hanya dilihat dari besarnya alokasi, tetapi juga dari kualitas perencanaan, ketepatan sasaran proyek, dan kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, perencanaan belanja modal harus diarahkan pada proyek produktif yang dapat memperkuat pendapatan asli daerah dan kemandirian fiskal jangka panjang (Maharani et al., 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dana perimbangan dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah di Pulau Jawa pada periode 2021-2025. Penelitian ini menggunakan data panel yang mencakup kabupaten/kota di Pulau Jawa dan akan menganalisis pengaruh masing-masing variabel terhadap kemandirian keuangan daerah. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai kontribusi dana perimbangan dan belanja modal dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat bagi pemerintah pusat dan daerah.

LANDASAN TEORI

Desentralisasi

Desentralisasi fiskal merupakan pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola fungsi pemerintahan dan keuangan publik secara lebih mandiri. Menurut (Iskandar, 2021) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal berkaitan dengan upaya meningkatkan efisiensi belanja pemerintah daerah dalam penyediaan layanan publik. Dengan demikian, desentralisasi tidak hanya dimaknai sebagai pelimpahan kewenangan administratif dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi juga sebagai pemberian ruang fiskal agar daerah mampu mengelola anggaran sesuai kebutuhan masyarakat dan memperkuat kemandirian keuangan daerah (Satiadi, 2021). Tujuan utama dari desentralisasi adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memperkuat akuntabilitas dan transparansi, melalui partisipasi aktif masyarakat serta pemantauan terhadap proses pengambilan keputusan dan penyediaan layanan (Ibrahim, 2024).

Dalam konteks desentralisasi fiskal di Indonesia, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diwujudkan melalui kebijakan Transfer ke daerah yang mencakup Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mendukung pendanaan urusan pemerintahan daerah sekaligus mengurangi ketimpangan kemampuan fiskal antar daerah. Secara konseptual, dana transfer dari pemerintah pusat dibutuhkan karena kapasitas pendapatan asli daerah setiap daerah tidak selalu sama, sehingga pemerintah pusat berperan menjaga pemerataan fiskal agar penyelenggaraan pelayanan publik tetap berjalan. Sejalan dengan itu, UU No. 1 Tahun 2022 menegaskan bahwa hubungan keuangan pusat dan daerah diarahkan untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien, transparan, akuntabel, dan berkeadilan, serta meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan Transfer ke Daerah.

Kemandirian Daerah

Kemandirian keuangan daerah merupakan indikator penting dalam menilai kemampuan pemerintah daerah membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat (Musviyanti et al., 2022). Sumber pendapatan pemerintah daerah secara umum terbagi dalam tiga kategori utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan/Transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang Sah. Di antara ketiga jenis pendapatan ini, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri, sementara dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan dana yang bersumber dari pemerintahan yang lebih tinggi atau entitas lain. Oleh karena itu, kemandirian fiskal atau keuangan suatu daerah sangat bergantung pada seberapa besar kontribusi PAD dalam struktur pendapatan daerah (Azwar, 2023).

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik melalui sumber pendapatan

yang berasal dari daerah sendiri. Rasio kemandirian digunakan untuk melihat seberapa besar pendapatan asli daerah dibandingkan dengan sumber pendapatan yang berasal dari luar daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin kecil ketergantungan fiskal daerah terhadap transfer pemerintah pusat (Tri, 2026). Dengan demikian, hubungan antara transfer fiskal dan kemandirian keuangan daerah perlu dilihat secara lebih proporsional, yaitu bukan hanya sebagai bentuk ketergantungan terhadap pemerintah pusat, tetapi juga sebagai mekanisme fiskal yang dapat mendorong peningkatan kapasitas keuangan daerah (Saptono & Mahmud, 2023).

Dalam penelitian ini, kemandirian keuangan daerah diukur dengan rasio pendapatan asli daerah terhadap pendapatan transfer. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Kemandirian Keuangan Daerah} : \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: DJPK Kemekenkeu

Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan bagian dari transfer ke daerah yang bertujuan untuk mendukung keseimbangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan mempertimbangkan potensi penerimaan dari daerah penghasil. DBH diberikan berdasarkan prinsip pembagian penerimaan tertentu yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam. DBH pajak mencakup Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Cukai Hasil Tembakau, sedangkan DBH sumber daya alam mencakup penerimaan dari sektor kehutanan, minyak bumi dan gas bumi, mineral dan batu bara, panas bumi, serta perikanan (Nurrahmadani, 2024).

Seperti dana perimbangan lainnya, Dana Bagi Hasil juga berfungsi sebagai pendapatan yang tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Penggunaan dana ini sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah, tanpa adanya pembatasan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, diharapkan penggunaan Dana Bagi Hasil dapat membantu meningkatkan kapasitas daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masa mendatang. Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki peran penting dalam mendorong kemandirian fiskal daerah, karena merupakan salah satu instrumen transfer pusat yang dialokasikan berdasarkan kontribusi daerah terhadap sumber daya alam dan pajak tertentu. Penelitian (Musfirati & Sugiyanto, 2021) menunjukkan bahwa DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, dengan mekanisme peningkatan PAD sebagai indikator utama kemandirian fiskal. Hasil ini sejalan dengan temuan (Marsdika Ayu Kinanti & Santorry, 2025) yang menegaskan bahwa transfer fiskal seperti DBH dapat meningkatkan kapasitas pendapatan daerah apabila pemanfaatannya diarahkan pada sektor produktif, bukan hanya untuk belanja rutin. Selanjutnya, (Riris Nurjanah, Arvian Triantoro, 2024) menemukan bahwa peningkatan DBH yang disertai belanja modal produktif dapat memperkuat aktivitas ekonomi lokal, sehingga menimbulkan efek pengganda yang meningkatkan PAD dan kemandirian fiskal jangka menengah. Dengan demikian, DBH tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemerataan fiskal, tetapi juga sebagai pendorong kapasitas fiskal daerah, asalkan penggunaannya terintegrasi dengan perencanaan anggaran yang produktif dan berorientasi pada peningkatan basis ekonomi lokal.

Berdasarkan pada pemikiran dan hasil penelitian-penelitian terdahulu penulis merumuskan hipotesa sebagai berikut:

H1 = Dana Bagi Hasil mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kemandirian daerah.

Dana Alokasi Khusus

Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki tujuan yang sama dengan Dana Alokasi Umum (DAU), yaitu untuk mendukung pemerataan dan keadilan antara daerah. DAK diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan ketentuan bahwa penggunaannya hanya diperuntukkan untuk kegiatan tertentu yang telah ditetapkan oleh

pemerintah pusat (Hidayat et al., 2026). Berbeda dengan DAU yang lebih fleksibel, DAK tidak bisa digunakan untuk keperluan lain selain yang sudah ditentukan. Meskipun demikian, meskipun penggunaannya terbatas, dampak positif yang dihasilkan oleh DAK seharusnya tetap sama dengan DAU, yakni dapat meningkatkan perekonomian daerah dan berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada akhirnya mendukung kemandirian keuangan daerah (Kuntadi et al., 2022).

Berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut: H2 = Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bertujuan untuk mencapai pemerataan dan keadilan antar daerah. Pemerintah daerah yang menerima DAU akan menganggap dana tersebut sebagai bagian dari pendapatan daerah yang diperoleh dari transfer dari pemerintah pusat (Mujiwardhani, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI 2022). Pendapatan ini kemudian digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran daerah. Diharapkan bahwa penggunaan DAU untuk belanja pemerintah daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, yang akhirnya akan memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan kemandirian daerah.

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap kemandirian keuangan daerah cenderung tidak selalu bersifat positif, bahkan dalam beberapa studi ditemukan berpengaruh negatif. (Imel Oktaviani Pramesti, 2025), dalam penelitian pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2021–2023, menemukan bahwa DAU berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah; semakin tinggi penerimaan dana transfer pusat, semakin rendah tingkat kemandirian daerah. Temuan serupa juga diperoleh (Indriani et al., 2023) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes periode 2018–2022, yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah karena tingginya DAU mencerminkan masih kuatnya ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Selain itu, (Yahya & Widajantie, 2023) juga menemukan bahwa DAU berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Dengan demikian, hasil penelitian ini sejalan dengan kecenderungan temuan empiris terbaru yang menjelaskan bahwa peningkatan DAU belum tentu memperkuat kemandirian fiskal, tetapi dapat menunjukkan bahwa daerah masih bergantung pada transfer pemerintah pusat dalam membiayai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu, penulis merumuskan hipotesis berikut: H3: Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Belanja Modal

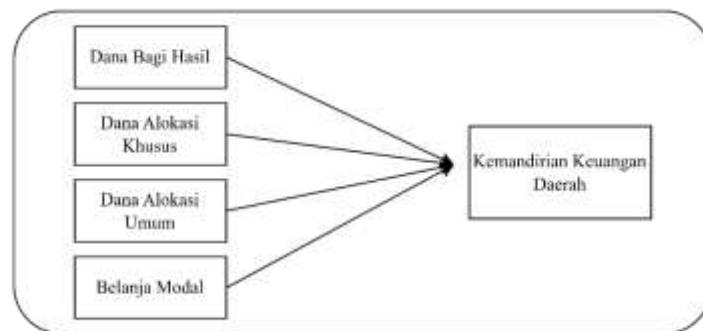
Belanja modal merujuk pada pengeluaran pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Pengeluaran ini, yang meliputi investasi infrastruktur, diharapkan dapat menciptakan efek multiplier yang mendukung pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi daerah. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa belanja modal masih menjadi salah satu faktor yang relevan dalam menjelaskan kemandirian keuangan daerah. (Ni Putu Ayu, 2023) dalam penelitiannya pada kabupaten/kota di Provinsi Bali, menemukan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa alokasi belanja modal yang diarahkan pada pembangunan aset produktif dan pelayanan publik dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah. Hasil serupa juga ditemukan oleh (Maharani et al., 2025) pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh, yang menyimpulkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian

keuangan daerah. Selain itu, (Bella et al., 2022) juga menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Dengan demikian, hasil penelitian ini sejalan dengan temuan empiris sebelumnya bahwa peningkatan belanja modal berpotensi memperkuat kemandirian keuangan daerah, terutama apabila belanja tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur dan aset daerah yang mampu mendorong peningkatan pendapatan daerah.

Berdasarkan pemikiran dan temuan-temuan penelitian sebelumnya, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian daerah.

H5: Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian daerah.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif-kausal untuk menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Modal (BM) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) di 114 kabupaten/kota di Pulau Jawa selama periode 2021–2025. Dengan estimasi akhir menggunakan 456 observasi karena model memasukkan variabel perubahan DAU dan perubahan belanja modal, sehingga observasi tahun awal pada masing-masing kabupaten/kota tidak digunakan dalam bentuk selisih tahunan. Data penelitian bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik (BPS), dan laporan keuangan kabupaten/kota. Dalam penelitian ini, EViews 12 digunakan untuk menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah. Pemanfaatan EViews 12 memungkinkan proses estimasi model regresi, pengujian signifikansi, serta evaluasi kelayakan model dilakukan secara lebih sistematis, sehingga hasil analisis tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga berbasis pengujian statistik (Al-Rubaie & Ahmed, 2023).

Pemilihan model panel terbaik dilakukan melalui Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier, yang menunjukkan bahwa Fixed Effect Model (FEM) adalah model paling sesuai untuk menangkap perbedaan karakteristik antar daerah. Sebelum analisis regresi, dilakukan uji asumsi klasik, meliputi multikolinearitas, heteroskedastisitas, guna memastikan validitas model. Analisis regresi juga mencakup uji R^2 , uji F, dan uji t, untuk menilai pengaruh variabel independen secara simultan maupun parsial terhadap kemandirian keuangan daerah.

Definisi Operasional Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai berikut:

a. Kemandirian Daerah

Kemandirian daerah dalam penelitian ini diukur menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD menggambarkan kemampuan daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahannya dengan sumber daya internal, tanpa terlalu bergantung pada dana

transfer dari pemerintah pusat. Semakin besar PAD yang diperoleh, semakin kecil ketergantungan daerah terhadap dana dari pemerintah pusat, yang berarti kemandirian daerah semakin meningkat.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk tujuan pemerataan keuangan antar daerah. Dana ini disalurkan tanpa batasan penggunaan, sehingga dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan daerah yang penting, terutama untuk menutupi celah fiskal antara pendapatan dan pengeluaran daerah.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk tujuan tertentu yang ditetapkan berdasarkan prioritas nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah. DAK dibagi menjadi dua kategori: DAK Fisik dan DAK Non-Fisik. DAK digunakan untuk mendanai kegiatan yang terkait dengan pembangunan fisik atau non-fisik yang menjadi prioritas nasional.

d. Dana Bagi Hasil (DBH)

DBH adalah dana yang diterima pemerintah daerah yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam yang diperoleh oleh pemerintah pusat. Alokasi DBH dilakukan berdasarkan prinsip "by origin," yaitu berdasarkan asal pendapatan yang dihasilkan di daerah tersebut. Pembagian DBH kepada daerah bertujuan untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal dan memenuhi kebutuhan pembangunan daerah.

e. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk investasi jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur dan pembelian aset tetap. Belanja modal mencakup pengeluaran untuk pembangunan jalan, jembatan, gedung, mesin, dan infrastruktur lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun. Tujuan dari belanja modal adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas aset daerah, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif-kausal guna menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Modal (BM) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (KKD2) pada 114 kabupaten/kota di Pulau Jawa selama periode 2021–2025, yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, BPS, dan laporan keuangan daerah. Penelitian ini menguji menggunakan regresi data panel dengan alat analisis EViews 12. Untuk menentukan model panel terbaik, dilakukan Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier, yang menunjukkan bahwa Fixed Effect Model (FEM) paling sesuai.

Sebelum dilakukan analisis regresi, dilaksanakan uji asumsi klasik (multikolinearitas, heteroskedastisitas) bersama dengan uji R^2 , uji F, dan uji t, untuk mengkaji pengaruh variabel independen baik secara bersamaan maupun secara terpisah terhadap KKD2. Setelah dilakukan penentuan model, kemudian dilanjutkan dengan uji asumsi klasik yang bertujuan untuk membuktikan bahwa hasil penelitian valid, tidak bias, konsisten dan koefisien regresinya efisien. Berdasarkan teori Napitupulu et al (2021) bahwa tidak diperlukan uji autokorelasi untuk data panel, maka uji asumsi klasik yang dilakukan untuk regresi data panel uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas. Karena variabel dependen KKD2 tidak berdistribusi normal, dilakukan transformasi logaritma natural (ln) untuk memperbaiki distribusi dan kestabilan varians residual. Hasil analisis menunjukkan DBH dan Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap KKD2, sementara DAK dan perubahan DAU berpengaruh negatif signifikan.

HASIL PENELITIAN

Hasil Uji Deskriptif

Analisis awal dilakukan untuk melihat karakteristik umum variabel penelitian: Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Modal (BM), dan Kemandirian Keuangan Daerah selama periode 2021–2025.

Tabel 1. Uji Statistik Deskriptif

Date: 05/04/26 Time: 09:29					
Sample: 2021 2025					
	DBH	DAK	DAU	BM	KKD2
Mean	25.43860	26.65614	27.56667	26.44737	24.07011
Median	25.00000	27.00000	28.00000	26.00000	23.21000
Maximum	31.00000	29.00000	34.00000	30.00000	64.94000
Minimum	24.00000	25.00000	0.00000	24.00000	14.72000
Std. Dev.	1.042465	0.712188	1.749701	0.837312	4.797597
Skewness	1.481715	-0.560518	-13.63242	0.732844	2.765363
Kurtosis	8.603142	4.003123	217.4758	4.489707	21.58812
Jarque-Bera	954.2066	53.74571	1110152.	103.7273	8932.546
Probability	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Sum	14500.00	15194.00	15713.00	15075.00	13719.96
Sum Sq. Dev.	618.3509	288.6035	1741.967	398.9211	13096.64
Observations	570	570	570	570	570

Berdasarkan Tabel 1. hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian memiliki jumlah observasi yang sama, yaitu 570 observasi selama periode 2021–2025. Variabel DBH memiliki nilai rata-rata sebesar 25,43860 dengan median 25,00000, yang menunjukkan bahwa secara umum nilai Dana Bagi Hasil relatif stabil pada kisaran tersebut selama periode 2021–2025. Nilai maksimum sebesar 31,00000 dan minimum sebesar 24,00000 mengindikasikan adanya variasi yang tidak terlalu besar antar pengamatan. Standar deviasi sebesar 1,042465 menunjukkan tingkat fluktuasi yang relatif rendah. Nilai skewness sebesar 1,481715 menandakan distribusi data yang condong ke kanan, sementara kurtosis sebesar 8,603142 menunjukkan distribusi yang lebih runcing dibandingkan distribusi normal (leptokurtik). Hasil uji Jarque-Bera dengan probabilitas 0,000000 mengindikasikan bahwa data DBH tidak berdistribusi normal.

Variabel DAK memiliki nilai rata-rata sebesar 26,65614 dengan median sebesar 27,00000, yang menunjukkan bahwa secara umum nilai Dana Alokasi Khusus berada pada kisaran yang relatif stabil. Nilai maksimum sebesar 29,00000 dan minimum sebesar 25,00000 mencerminkan variasi yang cukup terbatas. Standar deviasi sebesar 0,712188 menunjukkan fluktuasi yang rendah. Nilai skewness sebesar -0,560518 menunjukkan distribusi yang sedikit condong ke kiri, sedangkan kurtosis sebesar 4,003123 mengindikasikan distribusi yang lebih runcing dibandingkan distribusi normal. Hasil uji Jarque-Bera dengan probabilitas 0,000000 menunjukkan bahwa data DAK tidak berdistribusi normal.

Variabel DAU memiliki nilai rata-rata sebesar 27,56667 dengan median sebesar 28,00000, yang menunjukkan bahwa secara umum nilai Dana Alokasi Umum berada pada tingkat yang cukup tinggi. Nilai maksimum sebesar 34,00000 dan nilai minimum sebesar 0,00000 mengindikasikan adanya perbedaan yang sangat ekstrem dalam data. Standar deviasi sebesar 1,749701 menunjukkan adanya variasi data. Nilai skewness yang sangat rendah yaitu -13,63242 menunjukkan distribusi yang sangat condong ke kiri, sedangkan kurtosis sebesar 217,4758

mengindikasikan distribusi yang sangat runcing (leptokurtik ekstrem) dan mengandung outlier yang signifikan. Hasil uji Jarque-Bera dengan probabilitas 0,000000 menegaskan bahwa data DAU tidak berdistribusi normal.

Variabel Belanja Modal (BM) memiliki nilai rata-rata sebesar 26,44737 dengan median sebesar 26,00000, yang menunjukkan bahwa secara umum tingkat belanja modal relatif stabil. Nilai maksimum sebesar 30,00000 dan minimum sebesar 24,00000 menunjukkan adanya variasi yang tidak terlalu besar. Standar deviasi sebesar 0,837312 mengindikasikan fluktuasi yang rendah. Nilai skewness sebesar 0,732844 menunjukkan distribusi yang condong ke kanan, sedangkan kurtosis sebesar 4,489707 menunjukkan distribusi yang lebih runcing dibandingkan distribusi normal. Hasil uji Jarque-Bera dengan probabilitas 0,000000 menunjukkan bahwa data BM tidak berdistribusi normal.

Variabel Kemandirian Keuangan Daerah (KKD2) memiliki nilai rata-rata sebesar 24,07011 dengan median sebesar 23,21000, yang menunjukkan bahwa secara umum kinerja keuangan daerah berada pada tingkat yang relatif moderat. Nilai maksimum sebesar 64,94000 dan minimum sebesar 14,72000 mengindikasikan adanya variasi yang cukup besar antar pengamatan. Standar deviasi sebesar 4,797597 menunjukkan tingkat fluktuasi yang cukup tinggi. Nilai skewness sebesar 2,765363 menunjukkan distribusi yang condong ke kanan, sedangkan kurtosis sebesar 21,58812 mengindikasikan distribusi yang sangat runcing (leptokurtik). Hasil uji Jarque-Bera dengan probabilitas 0,000000 menegaskan bahwa data KKD2 tidak berdistribusi normal.

Hasil Uji Chow

Tabel 2. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	8.411037	(113,338)	0.0000
Cross-section Chi-square	610.195079	113	0.0000

Hasil uji chow pada Tabel 2. menunjukkan nilai probabilitas *F Cross-section* 0.0000, yang berada dibawah batas signifikasi 0.05. Sehingga, model terpilih yang akan digunakan untuk estimasi regresi adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Hasil Uji Hausman

Tabel 3. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	43.859344	4	0.0000

Hasil uji hausman pada Tabel 3. menunjukkan nilai probabilitas *F Cross-section* 0.0000, yang berada dibawah batas signifikasi 0.05. Sehingga, model terpilih yang akan digunakan untuk estimasi regresi adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Hasil Uji Lagrange Multiplier

Tabel 4. Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects			
Null hypotheses: No effects			
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives			
	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	233.8536 (0.0000)	0.690841 (0.4059)	234.5444 (0.0000)

Hasil dari Tabel 4. diatas uji lagrange multiplier menunjukkan nilai probabilitas *Breusch-Pagan* 0,0000, yang berarti berada di bawah signifikansi 0,05. Dengan demikian, model paling tepat untuk mengestimasi persamaan regresi adalah REM.

Pemilihan model regresi panel dilakukan melalui uji Chow dan uji Hausman, dan menunjukkan bahwa *Fixed Effect Model* (FEM) paling sesuai untuk menangkap variasi tetap antar kabupaten/kota. Uji Lagrange Multiplier juga dilakukan dan mengkonfirmasi adanya efek heterogen antar unit, meskipun tidak memengaruhi keputusan pemilihan model FEM.

Hasil Uji Asumsi Klasik Uji Multikolinieritas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas

	DBH	DAK	D(DAU)	D(BM)
DBH	1.000000	0.348519	0.305596	0.052221
DAK	0.348519	1.000000	0.197077	0.051190
D(DAU)	0.305596	0.197077	1.000000	0.008485
D(BM)	0.052221	0.051190	0.008485	1.000000

Berdasarkan dari hasil Tabel 5. matriks korelasi menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang kuat antar variabel independen, karena seluruh nilai koefisien korelasi berada di bawah 0,8. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi multikolinieritas dalam model penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa variabel DBH, DAK, D(DAU), dan D(BM) layak digunakan secara bersamaan dalam analisis regresi lanjutan.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: ABS(RESID)				
Method: Panel Least Squares				
Date: 05/04/26 Time: 09:19				
Sample (adjusted): 2021 2025				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 114				
Total panel (balanced) observations: 456				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.85E-05	0.000199	0.243636	0.8077
DBH	-1.87E-06	4.04E-06	-0.462532	0.6440

DAK	-1.72E-07	6.46E-06	-0.026612	0.9788
D(DAU)	-1.28E-06	1.19E-06	-1.083527	0.2793
BM	9.54E-07	3.15E-06	0.302654	0.7623

Hasil regresi pada Tabel 6. menunjukkan bahwa seluruh variabel independen, yaitu DBH, DAK, D(DAU), dan BM, memiliki nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, dengan masing-masing probabilitas 0,6440, 0,9788, 0,2793, dan 0,7623. Nilai konstanta (C) juga tidak signifikan dengan probabilitas 0,8077. Hal ini menandakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan dari variabel independen terhadap nilai absolut residual, sehingga model bebas dari heteroskedastisitas. Dengan demikian, variasi residual bersifat konstan dan model regresi panel dapat digunakan secara valid untuk analisis lebih lanjut dan pengujian hipotesis.

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Data Panel

Tabel 7. Hasil Regresi Data Panel

Dependent Variable: KKD2				
Method: Panel Least Squares				
Date: 05/04/26 Time: 09:03				
Sample (adjusted): 2021 2025				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 114				
Total panel (balanced) observations: 456				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-13.34298	9.321178	-1.431469	0.1532
DBH	3.197082	0.196321	16.28497	0.0000
DAK	-1.644533	0.312971	-5.254584	0.0000
D(DAU)	-0.206861	0.057716	-3.584126	0.0004
D(BM)	1.461403	0.111389	13.11980	0.0000
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.952396	Mean dependent var	23.86496	
Adjusted R-squared	0.935917	S.D. dependent var	4.675650	
S.E. of regression	1.183620	Akaike info criterion	3.393130	
Sum squared resid	473.5235	Schwarz criterion	4.459915	
Log likelihood	-655.6336	Hannan-Quinn criter.	3.813359	
F-statistic	57.79658	Durbin-Watson stat	1.105728	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Koefisien Determinasi (R-Square dan Adjusted R-Squared)

R-squared	0.952396
Adjusted R-squared	0.935917

Hasil nilai R-squared yang disajikan pada Tabel 7. sebesar 0,952396 menunjukkan bahwa sebesar 95,24 persen variasi pada variabel dependen dapat dijelaskan oleh seluruh variabel independen yang digunakan dalam model. Hal ini mengindikasikan bahwa model memiliki daya jelaskan yang sangat kuat, karena hampir seluruh perubahan pada variabel dependen mampu diterangkan oleh variasi variabel penjelas. Sementara itu, nilai Adjusted R-squared sebesar 0,935917 menunjukkan bahwa setelah memperhitungkan jumlah variabel independen dan derajat kebebasan model, sekitar 93,59 persen variasi variabel dependen masih dapat dijelaskan oleh

model. Nilai Adjusted R-squared yang tetap tinggi dan tidak berbeda jauh dari R-squared menandakan bahwa model telah terspesifikasi dengan baik. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dapat dikatakan memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menjelaskan hubungan antar variabel, sehingga layak digunakan untuk analisis lebih lanjut dan penarikan kesimpulan.

Uji Analisis Linier Berganda

Berdasarkan hasil estimasi regresi linier berganda, diperoleh persamaan model regresi sebagai berikut:

$$KKD = -13,34298 + 3,197082 DBH - 1,644533 DAK - 0,206861 D(DAU) + 1,461403 D(BM) + \varepsilon$$

Persamaan tersebut menunjukkan hubungan antara variabel dependen KKD dengan variabel independen DBH, DAK, D(DAU), dan D(BM). Koefisien regresi mencerminkan arah serta besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap KKD dengan asumsi variabel lain konstan.

Nilai konstanta sebesar $-13,34298$ dengan probabilitas $0,1532 (> 0,05)$ menunjukkan bahwa konstanta tidak signifikan secara statistik. Hal ini berarti ketika seluruh variabel independen bernilai nol, nilai KKD tidak berbeda secara signifikan dari nol. Meskipun demikian, konstanta tetap merepresentasikan nilai dasar (baseline) dalam model.

Koefisien regresi variabel Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar $3,197082$ dan signifikan secara statistik (probabilitas $0,0000 < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan DBH sebesar satu satuan akan meningkatkan nilai KKD sebesar $3,197082$, dengan asumsi variabel lain konstan. Temuan ini mengindikasikan bahwa DBH memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki koefisien regresi sebesar $-1,644533$ dan signifikan secara statistik (probabilitas $0,0000 < 0,05$). Artinya, setiap peningkatan DAK sebesar satu satuan akan menurunkan nilai KKD sebesar $1,644533$, ceteris paribus. Hasil ini menunjukkan bahwa DAK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

Variabel perubahan Dana Alokasi Umum (D(DAU)) memiliki koefisien sebesar $-0,206861$ dan signifikan secara statistik (probabilitas $0,0004 < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan perubahan DAU akan menurunkan nilai KKD sebesar $0,206861$, dengan asumsi variabel lain tetap. Dengan demikian, perubahan DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel dependen.

Koefisien regresi variabel perubahan Belanja Modal (D(BM)) sebesar $1,461403$ dan signifikan secara statistik (probabilitas $0,0000 < 0,05$). Artinya, setiap peningkatan perubahan belanja modal sebesar satu satuan akan meningkatkan nilai KKD sebesar $1,461403$, dengan asumsi variabel lain konstan. Hal ini menunjukkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

Secara keseluruhan, hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel DBH dan D(BM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap KKD, sedangkan DAK dan D(DAU) berpengaruh negatif dan signifikan. Model ini mengindikasikan bahwa komponen pendapatan dan pengeluaran daerah memiliki peran penting dalam menjelaskan variasi kinerja keuangan daerah selama periode penelitian.

Uji Parsial (Uji t)

Konstanta (C) memiliki nilai *t-statistic* sebesar $-1,431469$ dengan tingkat signifikansi $0,1532$. Nilai absolut *t-statistic* tersebut lebih kecil dari nilai *t-tabel* ($\pm 1,96$) dan nilai probabilitas

lebih besar dari 0,05, sehingga konstanta tidak signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa ketika seluruh variabel independen bernilai nol, nilai dasar variabel dependen tidak berbeda secara signifikan dari nol.

Variabel Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki nilai *t-statistic* sebesar 16,28497 dengan tingkat signifikansi 0,0000. Nilai tersebut jauh lebih besar dari *t*-tabel dan probabilitas lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa DBH berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen. Koefisien positif sebesar 3,197082 menunjukkan bahwa peningkatan DBH akan meningkatkan nilai variabel dependen, dengan asumsi variabel lain konstan.

Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai *t-statistic* sebesar -5,254584 dengan tingkat signifikansi 0,0000. Nilai absolut *t-statistic* lebih besar dari *t*-tabel dan probabilitas lebih kecil dari 0,05, sehingga DAK berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen. Koefisien negatif sebesar -1,644533 mengindikasikan bahwa peningkatan DAK akan menurunkan nilai variabel dependen, *ceteris paribus*.

Variabel perubahan Dana Alokasi Umum (D(DAU)) memiliki nilai *t-statistic* sebesar -3,584126 dengan tingkat signifikansi 0,0004. Nilai absolut *t-statistic* lebih besar dari *t*-tabel dan probabilitas lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa D(DAU) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen. Koefisien negatif sebesar -0,206861 menunjukkan bahwa peningkatan perubahan DAU cenderung menurunkan nilai variabel dependen.

Variabel perubahan Belanja Modal (D(BM)) memiliki nilai *t-statistic* sebesar 13,11980 dengan tingkat signifikansi 0,0000. Nilai tersebut jauh lebih besar dari *t*-tabel dan probabilitas lebih kecil dari 0,05, sehingga D(BM) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen. Koefisien positif sebesar 1,461403 menunjukkan bahwa peningkatan perubahan belanja modal akan meningkatkan nilai variabel dependen, dengan asumsi variabel lain tetap.

Uji Simultan (Uji f)

Tabel 8. Hasil Uji f

Metric	Value
F-statistic	57.79658
Prob(F-statistic)	0

Berdasarkan hasil uji F pada Tabel 8. diperoleh nilai *F-statistic* sebesar 57,79658 dengan probabilitas sebesar 0,000000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 5 persen (0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), perubahan Dana Alokasi Umum (D(DAU)), dan perubahan Belanja Modal (D(BM)) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi linier berganda yang digunakan layak dan signifikan secara statistik, karena seluruh variabel independen secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Hasil uji F ini mengindikasikan bahwa model memiliki *goodness of fit* yang baik dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengujian hipotesis penelitian lebih lanjut

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian regresi, variabel DBH, DAK, DAU, dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah se-Pulau Jawa tahun 2021–2025. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas masing-masing variabel yang lebih kecil dari 0,05, sehingga secara parsial keempat variabel tersebut berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Selain itu, nilai Prob(*F-statistic*) sebesar 0,000000 yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa DBH, DAK, DAU,

dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Pengaruh dari masing-masing variabel menunjukkan hasil yang berbeda. DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, yang berarti peningkatan DBH cenderung mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah. Sebaliknya, DAK dan DAU berpengaruh negatif dan signifikan, sehingga semakin besar ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat, maka kemandirian keuangan daerah cenderung menurun. Sementara itu, belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa belanja modal yang diarahkan pada pembangunan produktif dapat memperkuat kapasitas ekonomi daerah dan mendukung peningkatan kemandirian fiskal.

Dengan demikian, hipotesis penelitian dapat diterima. Dana perimbangan dan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah se-Pulau Jawa tahun 2021–2025. Namun, pengaruh tersebut tidak memiliki arah yang sama, karena DBH dan Belanja Modal berperan dalam meningkatkan kemandirian daerah, sedangkan DAK dan DAU cenderung menunjukkan ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas pengelolaan dana, orientasi belanja, dan kemampuan daerah dalam memaksimalkan PAD menjadi faktor utama dalam mencapai kemandirian keuangan daerah.

Penulisan dalam literatur ini masih terdapat banyak kelemahan, penulis menyarankan beberapa hal bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan dana perimbangan dan belanja modal dengan fokus pada proyek-proyek produktif yang dapat meningkatkan kapasitas ekonomi lokal dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat kontribusi PAD melalui inovasi pendapatan dan pengelolaan sumber daya lokal. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan analisis komparatif lintas provinsi atau lintas periode waktu yang lebih panjang, serta mempertimbangkan variabel tambahan seperti kualitas perencanaan belanja, kapasitas manajemen fiskal, dan efektivitas pengawasan penggunaan dana, agar pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi kemandirian keuangan daerah menjadi lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Rubaie, Q. L. A., & Ahmed, A. S. (2023). Measuring and analyzing the repercussions of public debt in financing the general budget deficit for the iraqi economy after 2003 using the (Eviews) program. *Materials Today: Proceedings*, 80, 3144–3154. <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.07.180>
- Azwar. (2023). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dan Potensi Pertumbuhan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 Azwar Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 7(1), 1–25.
- Bella, S., Sari, F., & Aswin, U. R. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(5).
- Febrian, K. A., Prayudi, M. A., & Pradnyana, P. Y. (2026). Hubungan Belanja Modal dan Transfer ke Daerah dengan Kemandirian Keuangan Daerah: Literature Review. *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research*, 4(2), 177–187.
- Fitriyani, E. N. I., & Suwarno, A. E. (2021). Pengaruh Pad, Dau, Belanja Modal, Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Seminar Nasional Akuntansi Dan Call for Paper (SENAPAN)*, 1(1), 61–69. <https://doi.org/10.33005/senapan.v1i1.228>
- Hidayat, S. A., Suharsono, A., Laily, Y. M., Nanda, M., & Hakim, A. (2026). Pengaruh Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur Tahun 2014–2023. *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN*, 11(2), 2705–2718.
- Ibrahim, A. H. H. (2024). Decentralization and its impact on improving public services.

- International Journal of Social Sciences*, 7(2), 45–53.
<https://doi.org/10.21744/ijss.v7n2.2278>
- Imel Oktaviani Pramesti, T. M. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 14, 3.
- Indriani, M. P., Wulandari, H. K., & Rahmawati, T. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Brebes (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Periode 2018-2022). *JACFIR: Journal of Accounting and Financial Research*, 1(4), 50–67.
<https://jurnal.eraliterasi.com/index.php/jacfir/article/view/140>
- Iskandar, A. (2021). Desentralisasi dan efisiensi belanja fungsi pendidikan serta implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat di propinsi sulawesi selatan. *Info Artha*, 5(1), 11–24.
- Kuntadi, C., Pamungkas, A., Damar Fitriyanti, D., & Astri, S. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 2(3), 278–289.
<https://doi.org/10.38035/jihhp.v2i3.1040>
- Maharani, P., Wahyuddin, Marzuki, & Jummaini. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Aceh. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 2(3), 3810–3818. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- Marsdika Ayu Kinanti, & Santorry. (2025). Pengaruh Dana Perimbangan dan Dana Keistimewaan terhadap Kemandirian Keuangan pada Kabupaten/Kota di Provinsi DIY. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 9(2), 138–157.
- Mujiwardhani, A. (2022). Dana Alokasi Khusus di Indonesia. In *Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI*.
- Musfirati, A., & Sugiyanto, H. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dan Dana Keistimewaan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi, Auditing, Dan Keuangan Vokasi*, 5(1), 20–36.
- Musviyanti, Khairin, F. N., Bone, H., Syakura, M. A., & Yudaruddin, R. (2022). Structure of local government budgets and local fiscal autonomy: Evidence from Indonesia. *Public and Municipal Finance*, 11(1), 79–89. [https://doi.org/10.21511/pmf.11\(1\).2022.07](https://doi.org/10.21511/pmf.11(1).2022.07)
- Ni Putu Ayu Septiyani Putri, & Gede Adi Yuniarta. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2017-2021. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 14(01), 133–147. <https://doi.org/10.23887/jap.v14i01.62916>
- Nugroho, F. A. (2025). Mendukung Otonomi Daerah di Kabupaten Wonosobo Tahun 2020–2024. *Jurnal Akuntansi*, 20(November), 30–47.
- Nurrahmadani, S. et al. (2024). Pengaruh Komponen Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Valid Jurnal Ilmiah*, 21(2), 162–179. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003>
- RifdaFadhilah, Tri Widiastuty. (2024). *PENGARUH DANA ALOKASI UMUM KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT (Studi Kasus Pada Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2017- 2020)*. 4(1).
- Riris Nurjanah, Arvian Triantoro, Raden Dian Hardiana. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Provinsi Jawa Barat Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2348–2361. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.216>
- Saptono, P. B., & Mahmud, G. (2023). Stimulus or Enforcement? How Intergovernmental Transfers Crowd-in Local Taxes in Indonesia. *Public Finance Review*, 51(6), 782–837. <https://doi.org/10.1177/10911421231191961>
- Satiadi, R. (2021). Desentralisasi Fiskal Di Kota Bandung (Studi Tentang Pemungutan Pajak

- Bphtb Di Pemerintah Kota Bandung). *Jurnal Transformasi Administrasi*, 11(2), 123–138.
- Tri, B. S. W. (2026). Pengaruh Pad Dalam Mendukung Kemandirian Fiskal Jawa Tengah Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 5(1), 144–151.
- Yahya, M., & Widajantie, T. D. (2023). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal terhadap kemandirian Keuangan Daerah Kota Blitar. *Ekonomi Dan Teknik*, 2(4), 317–325. <https://etnik.rifainstitute.com>